

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara dinamika intervensi PBB ke Sudan dalam tajuk UNMIS dengan hasil referendum yang pada akhirnya diambil Sudan Selatan untuk berpartisi dari Sudan pada tahun 2011. Sudan pada awalnya memiliki kedekatan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Tiongkok, sementara proses demokrasi dan tuntutan *self-determination* Sudan Selatan didukung oleh bantuan AS. Kondisi tersebut seakan membentuk perang sipil dengan patronase masing-masing, terlebih lagi sikap Tiongkok yang tidak hirau pada persoalan HAM apabila sedang beraktivitas bisnis dengan Sudan dengan menjual berbagai senjata untuk perang. Namun peristiwa genosida atas konflik Sudan-Sudan Selatan yang menyebabkan korban hingga dua juta jiwa membuat AS dan Tiongkok tidak memiliki pilihan lain kecuali turut dalam operasi *peacekeeping* PBB melalui UNMIS untuk mengamankan kepentingan masing-masing. Mengacu pada argumentasi Benjamin Miller bahwa bentuk intervensi yang melibatkan banyak negara disebut dengan intervensi kooperatif yang apabila dilaksanakan di negara lemah dan inkongruen seperti Sudan akan menghasilkan *cold peace*. Adanya *cold peace* tersebut berbentuk *Comprehensive Peace Agreement* yang dilaksanakan oleh UNMIS kemudian mengarah pada lima mekanisme yakni, *reassurance*, *deterrence*, *restraint*, reduksi konflik hingga berakhir pada hasil referendum yakni partisi tahun 2011. Keputusan partisi tersebut terjadi sebagai hasil akhir pilihan yang cenderung dilakukan oleh Sudan Selatan sebagai kelompok revisionis penuntut *self-determination* karena dipengaruhi dinamika intervensi AS dan Tiongkok yang dinamis.

Kata Kunci: perang sipil, partisi, intervensi kooperatif, negara lemah dan inkongruen, *cold peace*, *reassurance*, *deterrence*, *restraint*, reduksi konflik, referendum.